

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua kegiatan operasional dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas pokok setiap instansi atau lembaga khususnya di lingkungan pemerintah diperlukan tersedianya sarana prasarana. Kebutuhan sarana prasarana tersebut untuk setiap tahun anggaran pada umumnya direncanakan dalam rencana kerja dan kegiatan masing-masing instansi yang penyusunannya dilaksanakan menjelang tahun anggaran baru. Kebutuhan terhadap ketersediaan sarana prasarana sebagai unsur penunjang bagi berjalannya suatu proses kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program-program yang telah digariskan pada umumnya dianggarkan pada pos/beban anggaran pengeluaran belanja barang dan jasa. Untuk merealisasikan rencana belanja barang/jasa tersebut dilaksanakan melalui suatu proses atau beberapa tahapan kegiatan yang keseluruhannya disebut sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa atau yang lebih dikenal dengan lelang (*Procurement*) telah banyak dilakukan oleh semua pihak baik dari pemerintah maupun swasta. Pengadaan Barang/Jasa pada pemerintah diartikan dengan kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (*Perpres No.54 Tahun 2010*).

Pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.80 Tahun 2003 yang sampai akhirnya Peraturan Presiden inipun dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2011. Sebagai gantinya ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2010 yang kemudian kembali diperbaharui dengan Perpres No.70 Tahun 2012.

Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang relatif lebih komprehensif diharapkan mampu untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pemerintah memberi peluang seluas-luasnya kepada usaha kecil, usaha mikro dan koperasi untuk mengikuti tender paket pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Baik Perpres No.80 Tahun 2003 ataupun Perpres No.54 Tahun 2010 ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan tujuan agar pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya pada Dinas Pasar Kota Padang. Penulis tertarik untuk mempelajari dan menjadikan **“Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pasar Kota Padang”**, sebagai judul dalam tugas akhir.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persiapan yang dilakukan Dinas Pasar Kota Padang dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa?
2. Bagaimana Dinas Pasar Kota Padang melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa?

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui bagaimana persiapan yang dilakukan Dinas Pasar Kota Padang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pasar Kota Padang.

1.4 Manfaat Magang

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengetahui perbandingan antara tinjauan teoritis dengan tinjauan secara empiris.
2. Menambah ilmu pengetahuan dalam memahami prosedur pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah khususnya pada Dinas Pasar Kota Padang.
3. Menambah wawasan manajemen yang luas dalam kerja sama dengan orang lain dari berbagai bidang dan skill.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jurusan Keuangan Negara dan Daerah Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori atau konsep-konsep yang mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM DINAS PASAR KOTA PADANG

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Dinas Pasar Kota Padang yang mencakup sejarah dan perkembangannya, ruang lingkup dari bentuk kegiatan-kegiatan serta struktur susunan organisasinya.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membicarakan mengenai hasil pembahasan masalah yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pasar Kota Padang

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

